

**PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP SKOR KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI  
KAB/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**



**Nama : Silka Gusdian  
Nim : 222016105**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

**PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP SKOR KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI  
KAB/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi**



**Nama : Silka Gusdian  
NIM : 222016105**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silka Gusdian  
NIM : 222016105  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, agustus 2020



Silka Gusdian

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

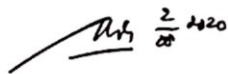
**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Skor Kinerja  
Penyelenggaraan pemerintah Daerah Di Kab/kota Provinsi  
Sumatera Selatan  
Nama : Silka Gusdian  
NIM : 222016105  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, agustus 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

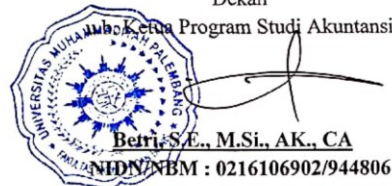


Drs. Sunardi, S.E., M.Si  
NIDN/NBM: 0206046303/784021



Lis Djuniar, SE., M.Si  
NIDN/NBM: 0220067101/1115716

Mengetahui,  
Dekan  
Ketua Program Studi Akuntansi



Berri, S.E., M.Si., AK., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto :

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(QS. Al-Insyirah: 6-7)

(Silka Gusdian)

Persembahan :

- Ayah (Syamsul Bahri) dan Ibu ( Syafrida Yanti) tercinta
- Adik-adik serta keluarga tersayang
- Pembimbingku
- Sahabat-sahabatku
- Teman-teman UMP seperjuangan
- Almamater tercinta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Al-hamdulillaahirobbil-‘alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan"**.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi,S.E,M.Si., dan Ibu Lis Djuniar, S.E., M.Si., yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati

2. Bapak Drs. H Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Siradjuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Fahmi,S.E.,M.Si., selaku Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan ilmunya baik praktik maupun teori selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Kantor BPKAD Kota Palembang
7. Teman-teman seperjuangan FEB-UMP 2016

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT .

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Palembang, Agustus 2020

Penulis

Silka Gusdian

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTARTABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
<b>BAB IPENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Bagi Penulis.....	12
2. Bagi Pemerintah Daerah.....	12
3. Bagi Almamater.....	13



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN**

### **HIPOTESIS ..... 14**

A. Landasan Teori .....	14
1. Teori Keagenan .....	14
2. Rasio Keuangan Pemerintah Daerah .....	16
3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	23
a. Definisi .....	23
b. Pengukuran Kinerja.....	25
B. Penelitian Sebelumnya .....	27
C. Kerangka Pemikiran .....	32
D. Hipotesis .....	33

## **BAB III METODE PENELITIAN ..... 34**

A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Operasionalisasi Variabel .....	35
D. Populasi dan Sampel .....	36
E. Data yang Diperlukan .....	39
F. Metode Pengumpulan Data .....	39
G. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	41
1. Analisis Data.....	41
2. Teknik Analisis.....	42

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	49
---------------------------	----

1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan .....	49
2. Kondisi Geografis, Sosial dan Budaya .....	49
3. Gambaran Umum Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan .....	53
4. Data Penelitian .....	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	58
1. Perhitungan Hasil Rasio .....	58
2. Pengujian Data .....	65
3. Pembahasan Hasil penelitian .....	78
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	82
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Kab/kota Se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018 .....	6
Tabel I.2 Skor status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015-2018.....	8
Tabel II.1 Kriteria rasio kemandirian .....	20
Tabel II.2 Kriteria rasio efektivitas .....	21
Tabel II.3 Kriteria rasio efisiensi .....	22
Tabel II.4 Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya .....	30
Tabel III.1 Operasionalisasi variabel .....	35
Tabel III.2 Populasi penelitian.....	37
Tabel III.3 Kriteria pengambilan sampel.....	38
Tabel III.4 Sampel Kab/Kota penelitian .....	38
Tabel IV.1 Laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Kab/kota Se- Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018 .....	55
Tabel IV.2 Skor status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015-2018.....	57
Tabel IV.3 Hasil perhitungan rasio kemandirian .....	59
Tabel IV.4 Hasil perhitungan rasio efektivitas .....	60
Tabel IV.5 Hasil perhitungan rasio efisiensi.....	62
Tabel IV.6 Hasil Perhitungan rasio keuangan dan skor EKPPD.....	64
Tabel IV.7 Statistik deskriptif .....	65
Tabel IV.8 Uji multikolinearitas .....	68
Tabel IV.9 Uji autokolerasi.....	69
Tabel IV.10 Hasil uji analisis regresi linier berganda .....	71
Tabel IV.11 Hasil uji koefisien determinasi .....	73
Tabel IV.12 Hasil uji f .....	74
Tabel IV.13 Hasil uji t.....	76

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka teori .....	32
Gambar IV.1 Uji normalitas.....	67
Gambar IV.2 Uji heteroskedastisitas.....	70

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Fotocopy Sertifikat Toefl

Lampiran 3 : Fotocopy Sertifikat Hapalan Surat-Surat Pendek

Lampiran 4 : Fotocopy Sertifikat Pelatihan Komputer Windows, *Microsoft Word*  
*and Microsoft Excel*

Lampiran 5 : Fotocopy Sertifikat *Generals Ledger Excel and Mind Your Own*  
*Business (MYOB) For Accounting*

Lampiran 6 : Bebas Plagiat

Lampiran 7 : Biodata Penulis

## **ABSTRAK**

**Silka Gusdian /222016105/2020/Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Sumatera Selatan/Akuntansi sektor Publik**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapakah pengaruh rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota di Sumatera Selatan secara parsial?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota di Sumatera Selatan secara parsial. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data laporan realisasi anggaran dan belanja dan data skor EKPPD tahun 2015-2018. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota di Sumatera Selatan secara parsial.

**Kata Kunci: Rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan skor EKPPD**

## Abstract

**Silka Gusdian / 222016105 /2020 /The Influence of Financial Ratios toward the Scoping Performance Results of the District /city in South Sumatra/ Public sector Accounting**

*This research is formulated whether or not there was a partial influence of the ratio of independence, effectiveness ratio, and efficiency ratio on the performance score of the regional administration in the District / City in South Sumatra. This research is aimed at determining the influence the ratio of independence, effectiveness ratio, and efficiency ratio toward the performance score of local government in the District / City in South Sumatra. The type of this research was an associative study. The data used was secondary data, in line with the budget realization and expenditure report data and the 2015-2018 EKPPD score data. The data collection technique was through documentation. Data analysis method used in this research was quantitative analysis. The results showed that the ratio of independence, effectiveness ratios, and efficiency ratios had a partial significant influence toward the performance scores of regional government in the districts / city in South Sumatra.*

**Keywords: Loneliness ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio and EKKPD score**

PENGESAHAN

NO. 201/Abstract/2020/UM VIII /20 20

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang *Fa*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari dua peran organisasi yaitu organisasi sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta. Peran pemerintah sangat besar dalam mengendalikan semua kehidupan masyarakat dan pihak swasta turut membantu pemerintah dalam mewujudkannya, Dilihat dari fungsinya, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi dan lain-lain yang sangat bergantung pada besarnya dana yang dimiliki, semakin besar dana teralokasikan dalam belanja guna menyelenggarakan program pemerintah maka kesejahteraan masyarakat semakin baik, tidak ada aktivitas yang tidak menggunakan dana begitu juga pelayanan pemerintah.

Pemerintah pusat maupun daerah merupakan pihak yang diberi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan wewenang, diperlukan pembiayaan dengan memungut berbagai macam jenis pendapatan dari masyarakat, kemudian membelanjakannya untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah yaitu menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan



pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengelola dana dan mengatur daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah. salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan oleh pemerintah adalah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) yang payung hukumnya adalah peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD).

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 pasal 1, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan data analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk, mengukur, menilai, membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) menggunakan laporan pemeriksaan pemerintah daerah (LPPD) sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tatanan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan indikator kinerja kunci. Indikator kinerja kunci adalah indikator utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah selain diatur dengan peraturan pemerintah juga mengikuti peraturan menteri dan keuangan daerah juga mengikuti anggaran pendapatan dan belanja daerah, masing masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2019 pasal 7 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, berdasarkan indikator kinerja pada masing masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban yang disusun secara periodik.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi (Indra, 2006:274). Pengukuran kinerja secara berkelanjutan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus mencapai keberhasilan dimasa mendatang (Indra, 2006:275), dengan catatan pencapaian indikator kinerja organisasi diharapkan dapat mengetahui

prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut Mardiasmo dalam Kusumawardani (2012) bahwa kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik lebih baik. Kinerja dapat berarti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai evaluasi bagaimana program tersebut berjalan, sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan, dan sebagai alat komunikasi dengan publik, dengan demikian penting untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga dapat mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat (Ristin, 2019).

Analisis rasio keuangan pada anggaran dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dengan rasio daerah lain atau potensi daerah yang relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Abdul, 2012:231).

Analisis rasio keuangan pada sektor publik penggunaannya belum begitu banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Abdul, 2007 : 231). Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda perlu dilaksanakan, meskipun kaidah akuntansi dalam laporan keuangan Pemda berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki organisasi privat. Pemerintah daerah yang memiliki tugas menjalankan kegiatan pembangunan. Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan akun-akun yang ada dalam satu laporan keuangan atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran. Analisis rasio biasanya digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, Jenis-jenis rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi (Abdul dan Muhammad, 2012:L-5)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agus 2014 yang melakukan penelitian terhadap karakteristik kepala daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berkesimpulan bahwa masa pejabat kepala daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah dengan tanda koefisien regresi negatif, sehingga artinya berdasarkan teori agensi, perilaku oportunistik memberi petunjuk bahwa manusia dalam berbagai situasi cenderung mengambil kesempatan untuk diri atau kelompoknya sendiri. Selanjutnya penelitian dari Winarso 2017 yang melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia: perspektif *upper echelon theory* dan karakteristik pemerintah

daerah dan hasil pengujian menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah berupa tingkat kemandirian berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan karakteristik kepala daerah dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berikut ini disajikan mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja serta Skor Status Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan periode 2015-2018.

**Tabel I.1**  
**Laporan Anggaran Dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab/kota**  
**Se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018**

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Anggaran Pendapatan (Ribuan Rupiah)	Realisasi Pendapatan (Ribuan Rupiah)	Anggaran Belanja (Ribuan Rupiah)	Realisasi Belanja (Ribuan Rupiah)
1	Palembang	2015	2.870.202.481	2.871.899.610	3.146.444.216	2.868.750.360
		2016	3.466.134.113	3.122.903.127	3.369.864.428	2.915.966.125
		2017	3.578.989.385	3.417.593.733	3.383.208.534	3.141.848.658
		2018	3.643.288.212	3.485.882.634	3.651.197.394	3.488.244.426
2	Muba	2015	2.506.193.141	2.034.401.344	2.364.027.425	1.899.319.701
		2016	2.849.225.683	2.640.255.197	2.516.296.929	2.516.296.929
		2017	2.876.720.007	2.642.776.006	2.566.618.015	2.340.644.994
		2018	2.703.265.186	3.019.699.825	3.203.365.186	2.958.060.291
3	Banyuasin	2015	1.833.573.044	1.540.083.544	1.755.075.142	1.540.083.544
		2016	2.180.253.159	1.951.227.051	1.909.404.888	1.602.242.344
		2017	2.014.566.266	2.006.422.252	2.566.618.015	2.340.644.994
		2018	1.948.005.479	2.080.649.009	2.035.556.230	1.992.040.769
4	Oki	2015	1.736.688.910	1.653.377.720	1.882.004.203	1.745.362.121
		2016	1.964.045.648	1.979.249.631	2.405.340.475	1.979.334.457
		2017	1.649.133.466	1.363.217.799	1.408.398.367	1.115.443.315
		2018	2.231.343.639	2.224.001.831	2.241.275.403	1.918.481.263
5	Ogan Ilir	2015	1.399.760.930	1.073.724.537	1.399.760.930	964.153.853
		2016	1.542.879.089	1.542.879.089	1.453.289.005	1.102.973.684
		2017	1.649.133.466	1.363.217.799	1.408.398.367	1.115.443.315
		2018	1.549.469.950	1.417.185.838	1.547.169.950	1.374.234.887
6	OKU	2015	1.109.603.969	1.034.793.698	1.220.349.843	1.085.467.499
		2016	1.241.663.992	1.192.981.912	1.192.981.912	993.279.511

		2017	1.416.035.133	1.396.244.570	1.297.686.974	1.186.374.978
		2018	1.311.311.318	1.412.521.909	1.463.688.662	1.419.173.692
<b>7</b>	<b>OKU selatan</b>	2015	933.698.026	933.056.431	1.038.873.351	925.258.905
		2016	1.236.605.536	1.236.605.536	1.122.067.311	1.014.409.319
		2017	1.258.607.949	1.222.264.959	1.082.192.218	989.011.519
		2018	1.227.209.054	1.268.126.824	1.303.537.687	1.228.203.115
<b>8</b>	<b>OKU timur</b>	2015	1.344.367.675	1.298.375.034	1.261.897.416	1.158.799.615
		2016	1.669.766.891	1.521.770.289	1.428.590.115	1.285.585.518
		2017	1.671.268.817	1.599.418.326	1.356.701.260	1.289.877.393
		2018	1.649.349.343	1.627.163.554	1.652.814.789	1.614.913.933
<b>9</b>	<b>Muara Enim</b>	2015	2.283.476.954	1.977.122.379	2.453.375.336	2.112.376.745
		2016	2.177.891.479	2.049.002.254	2.180.613.601	1.856.355.068
		2017	2.416.523.878	2.402.350.260	2.033.737.393	1.897.083.715
		2018	2.064.926.236	2.525.583.634	2.417.264.086	2.434.360.114
<b>10</b>	<b>Prabumulih</b>	2015	895.489.650	816.654.321	1.011.173.914	922.580.955
		2016	1.072.008.198	940.737.360	1.018.217.047	891.296.683
		2017	930.320.518	930.320.518	956.939.607	956.939.607
		2018	874.733.232	958.368.934	872.733.232	850.890.467
<b>11</b>	<b>Lahat</b>	2015	1.657.846.559	1.559.989.661	1.657.846.559	1.559.989.661
		2016	1.868.537.150	1.726.004.654	1.747.349.170	1.545.145.014
		2017	1.957.810.446	1.765.015.019	1.715.307.187	1.408.832.916
		2018	1.740.437.900	1.916.874.000	1.838.590.794	1.834.483.998
<b>12</b>	<b>Pagar Alam</b>	2015	816.005.973	747.658.414	904.406.482	795.537.900
		2016	874.003.600	814.062.290	945.858.698	797.621.810
		2017	888.544.891	812.270.609	893.475.825	743.610.049
		2018	817.250.572	769.448.437	826.658.246	655.603.214
<b>13</b>	<b>Musi Rawas</b>	2015	1.504.015.512	1.616.908.301	1.592.855.152	1.405.099.541
		2016	1.763.644.399	1.617.409.674	1.713.677.287	1.531.168.541
		2017	1.625.481.874	1.549.566.489	1.313.648.923	1.192.026.376
		2018	1.697.033.491	1.759.880.995	1.681.581.278	1.648.414.553
<b>14</b>	<b>Lubuk Linggau</b>	2015	861.092.232	821.900.180	896.317.650	821.639.554
		2016	975.225.201	883.629.694	896.856.354	809.943.066
		2017	1.002.530.943	906.258.990	967.151.199	870.709.076
		2018	952.999.507	923.898.833	868.799.507	859.995.202
<b>15</b>	<b>Empat Lawang</b>	2015	728.699.641	757.424.055	728.699.641	728.699.641
		2016	895.125.276	801.728.601	750.557.059	648.861.582
		2017	963.691.978	904.327.377	792.729.567	722.850.409
		2018	951.766.581	978.617.329	951.766.581	968.083.615
<b>16</b>	<b>Muratara</b>	2015	678.008.927	616.908.301	744.142.494	670.724.435
		2016	797.621.810	813.614.247	789.741.912	720.301.758
		2017	812.629.762	785.394.510	755.212.199	677.194.130
		2018	945.842.746	922.981.792	963.759.600	867.583.014

<b>17</b>	<b>Pali</b>	2015	717.518.854	605.979.409	733.798.654	622.474.176
		2016	893.929.818	806.302.689	821.589.125	743.680.887
		2017	1.022.757.871	992.302.734	928.100.489	865.926.979
		2018	1.356.800.901	1.226.434.373	1.580.900.901	1.359.663.867

(sumber: [www.bpk.ri.go.id](http://www.bpk.ri.go.id) 2016-2019)

**Tabel I.2**  
**Skor Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015-2018**

No	Nama Kab/Kota Pemerintah Daerah	Skor tahun 2015	Skor tahun 2016	Skor tahun 2017	Skor tahun 2018
1	Palembang	2.9114	3.0768	3.0427	3.0768
2	Musi Banyuasin	2.9850	3.0575	2.8552	3.0575
3	Banyuasin	3.0752	2.9786	2.8655	2.9786
4	Ogan Komering ilir	3.1362	3.1356	2.9652	3.1356
5	Ogan Ilir	2.9143	3.0434	2.8794	3.0434
6	Ogan Komering Ulu	2.8871	2.9876	2.8911	2.9876
7	OKU Selatan	2.8824	2.7696	2.7084	2.7696
8	OKU Timur	2.8944	2.8131	2.7045	2.8131
9	Muara enim	3.1114	3.1195	2.9910	3.1196
10	Prabumulih	2.9593	3.0161	2.9633	3.0161
11	Lahat	3.0835	3.0574	2.8902	3.0574
12	Pagar alam	2.6741	2.9768	2.8660	2.9768
13	Musi Rawas	3.1092	3,1996	2.9410	3.1996
14	Lubuk Linggau	3.0670	2.9761	2.7623	2.9761
15	Empat Lawang	2.7425	2.8922	2.8034	2.8922
16	Muratara	-	-	-	-
17	Pali	-	-	-	-

(sumber: kemendagri.go.id 2016-2019)

Berdasarkan Tabel I.1 diketahui bahwa setiap tahunnya pada perhitungan realisasi pendapatan dan belanja di setiap Kab/Kota mengalami penurunan dan kenaikan. Pada Kota Palembang, Kabupaten Pali dan Kabupaten Muratara

mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada Kabupaten Muba, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Empat Lawang tahun 2018 mengalami penurunan. Kabupaten Banyu Asin dan Kota Prabumulih tahun 2016 mengalami kenaikan tetapi tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan. Kabupaten OKI dan Kabupaten Musirawas tahun 2016 mengalami kenaikan namun tahun 2017 menurun dan tahun 2018 mengalami kenaikan lagi sedangkan Kabupaten Muara Enim tahun 2016 terjadi penurunan pada tahun 2017 kembali menaik dan pada tahun 2018 terjadi penurunan lagi, dilihat dari pendapatan dan belanja setiap tahunnya, dan dilihat dari anggaran rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi yang terealisasinya masih banyak yang belum stabil.

Menurut Welly dan Lis (2017) laporan realisasi anggaran dikatakan Surplus/Defisit apabila pendapatan lebih besar dibandingkan belanja, diketahui bahwa laporan realisasi anggaran Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan bahkan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana rasio-rasio bisa menjelaskan kondisi keuangan-keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan tabel I.2 dari data diatas dapat dilihat mana daerah yg mempunyai kinerja yang baik dan kinerja yang cukup baik ataupun yang kurang baik, dan daerah yang masih cukup bergantung pada pemerintah pusat dengan tidak stabilnya realisasi pendapatan dan realisasi belanja setiap tahunnya yang mengakibatkan naik turunnya skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.



Kabupaten Muratara dan Kabupaten Pali belum memiliki skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dikarenakan kabupaten tersebut baru berdiri kurang lebih 7 tahunan sedangkan skor SKPPD di nilai 10 tahun setelah berdirinya Kab/kota tersebut.

Keputusan Menteri Dalam Negeri no 118-8840 tahun 2018 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dalam Diktum Keenam peringkat dan status kinerja sangat tinggi penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dengan atribut bintang.

Penetapan atribut bintang untuk prestasi kinerja sangat tinggi terhadap kabupaten dan kota dilakukan dengan menetapkan batas dan skor kinerja tertinggi 3,7500 untuk batas atas bintang (\*\*\*\*\*) dan 3.0000 untuk batas bawah bintang (\*) dan menetapkan 0,1875 sebagai interval pembagi dalam menentukan interval pemberian atribut bintang.

Sebagaimana dinyatakan dalam diktum ketujuh peringkat dan status kinerja sangat tinggi penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dengan atribut bintang sebagaimana dimaksud dalam diktum keenam, dikelompokkan dalam lima kategori tingkat pencapaian kinerja dan diberikan atribut bintang mulai dari bintang \* sampai bintang \*\*\*\*\*, guna menunjukkan adanya perbedaan kemampuan dan kualitas capaian kinerja antar pemerintah daerah saat ini dalam kelompok sangat tinggi dan target peningkatan kinerja maksimal yang akan datang.

Berdasarkan hasil uraian dalam latar belakang permasalahan dan terbatasnya penelitian tentang rasio keuangan dengan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh rasio kemandirian terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimanakah pengaruh rasio efektivitas terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimanakah pengaruh rasio efisiensi terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

#### **1. Bagi Penulis**

Sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh rasio keuangan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan

#### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung tentang pengaruh rasio keuangan dengan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan

### 3. Bagi Almamater

Hasil penelitian tentang pengaruh rasio keuangan dengan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007) *Akuntansi Keuangan daerah*. Edisi 3. Jakarta. Salemba Empat.
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2012) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta. Salemba Empat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Retrieved Januari 29, 2020, from [https://palembang.bpk.go.id/?page\\_id=19317](https://palembang.bpk.go.id/?page_id=19317)
- Firmansyah dan Hadi. (2017). *Modul kerjasama peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah: akuntansi keuangan pemerintah daerah*
- Hendro Sumarjo (2010) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah Kab/Kota Di Jawa Tengah*
- Hartoyo (2014) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Indonesia*
- Hartono.2018. *Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS*. Penerbit CV BUDI UTAMA. Yogyakarta
- Indra Bastian.(2006) *sistem akuntansi sektor publik*. Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat
- Irham Fahmi (2012). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Cetakan Ke-2. Bandung. Alfabeta
- Indra Bastian. (2014) *audit sektor publik*. Edisi 3. Jakarta. Salemba Empat
- Keputusan Menteri Dalam Negeri no 118-8840 tahun 2018 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2017
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia Press.
- Mardiasmo.(2012). *Akuntansi Sektore Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja keuangan*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Muhammad Mahsum.(2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Nanda dan Yogi (2017) *Pengaruh rasio keuangan terhadap Kinerja Pemerintah daerah Kab/Kota Di Jawa Timur Tahun 2013-2015*

- Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Peni Sedyaningsih. (2015). *Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan)*
- Romie Priyastama. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS Pengelolaan Data dan Analisis Data*. Yogyakarta: Start Up
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2019 pasal 7 tentang Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Risma Diri Atha, Prayitno Basuki. (2015). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB.) Jurnal Investasi Vol.11, No.2, Desember 2015*
- Rismawati Mattalata. (2018). *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas dasar Prestasi Kinerja berorientasi kedepan*. Makassar : Celebes Media Perkasa
- Ristin Martania. (2019). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan*
- Sigit Sahrul Akrom (2018) *Hubungan antara Opini dan Temuan Audit dengan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah*
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah
- Uma Sekaran dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi 6. Buku Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Welly dan Lis Djuniar. (20117). *Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009-2015*. Jurnal Ekonomi. Vol.22. No.1:1-21